

PENGARUH *FLYPAPER EFFECT* PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL

Novyani Ajeng Prianti Atmadja

novyaniajeng95@gmail.com

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to test empirically whether there influence of Flypaper Effect, Local own source revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Financing Surplus (SILPA) to the Capital Expenditure of districts/cities of East Java Province in 2014-2016 periods. The population is all 38 local districts/cities government in East Java Province in 2014-2016 periods so the total population is 114 local governments. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. Based on the predetermined criteria, 105 local governments have been selected as samples. The data is the secondary data which is in the form of Budget Realization Report data which has been obtained from the Local Asset and Financial Management Board (BPKAD) of East Java Province. The analysis method has been done by using multiple regression analysis. The results show that Local own source revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) give positive influence to the Capital Expenditure. Meanwhile, Financing Surplus (SILPA) and Flypaper Effect do not have any influence to the Capital Expenditure.

Keywords: Flypaper effect, local own source revenue, general allocation fund, financing surplus and capital expenditures.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah terjadi pengaruh *Flypaper Effect* Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014-2016 sehingga total seluruh populasi adalah 114 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 105 pemerintah daerah. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan untuk variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Timur semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengelolaan potensi daerah, dari tahun 1999 pemerintah pusat mengambil sebuah kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki daerah masing-masing yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian aturan regulasi tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Terdapat juga sebuah peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam pemungutan kepada masyarakat daerah yang bertujuan untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, regulasi tersebut membawa paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahnya sendiri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memiliki peranan penting dalam upaya pemberdayaan daerah, supaya pemerintah daerah tersebut mampu mengoptimalkan serta mengembangkan potensi daerah masing-masing guna mampu mengelola pemerintah daerah dengan mandiri dan diharapkan tidak bergantung kepada pemerintah pusat dimana pemerintah daerah meminta dana.

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah, dapat memberikan hak dan kewenangan daerah dalam mengelola potensi masing-masing daerahnya. Namun selain itu, pemerintah daerah juga harus dituntut mampu secara mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya. Sehingga pemerintah daerah harus memiliki wewenang dan kemampuan dalam menggali sumber keuangannya sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan adanya desentralisasi ini, diharapkan mampu menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama dapat mampu mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah yang ada. Kedua diharapkan mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pengambilan peran keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah dan memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah pusat sebagai pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan pro dan kontra bagi setiap daerah masing-masing. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang baik tentu akan menyambut kebijakan ini dengan baik, sebaliknya daerah yang miskin akan sumber daya alam serta infrastruktur yang kurang memadai akan menanggapi kebijakan ini dengan perasaan khawatir dikarenakan akan mendapatkan pendapatan yang rendah. Dengan diterapkannya kebijakan ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan daerah masing-masing agar bisa mengembangkan dan mempersiapkan segala aspek baik dari sumber dayanya maupun infrastruktur lainnya. Pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pokok yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang mendasari terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah yang mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan yang mendasari potensi daerah masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi. Arti dari desentralisasi, merupakan sebuah upaya untuk mendukung kegiatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara proporsional dan diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang adil serta perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, dengan hal itu digunakan sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang Undang tentang pemerintah daerah telah menetapkan bahwa salah satu sumber penerimaan adalah pajak yang berasal dari dalam daerah dan pajak tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerahnya. Adapun sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan daerah (*capital investment*) yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang didapatkan melalui pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan untuk memberikan keluasaan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan daerah berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan masing-masing daerah memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda. Daerah yang memiliki kemajuan didalam bidang industri dan memiliki banyak kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki industri dan sumber daya alam yang sedikit. Sehingga terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, sebaliknya ada daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah karena miskin akan sumber daya alamnya.

Halim (2002) menyatakan bahwa dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat sangatlah penting karena menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam laporan dan diperhitungkan di APBD. Beberapa peneliti telah menemukan respon dari pemerintah daerah sangat berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkan berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) menyatakan bahwa ketika pemerintah daerah merespon (belanja) daerahnya lebih besar terhadap transfer dari pada pendapatannya sendiri, maka hal tersebut disebut *flypaper effect*.

Turnbull (dalam Haryo, 2007) menyatakan *Flypaper Effect* merupakan suatu fenomena dimana pada saat terjadi kondisi ketika pemerintah daerah merespon lebih banyak belanja daerahnya yang berasal dari transfer pemerintah pusat atau lebih spesifiknya pada transfer tidak bersyarat. Dimana, transfer atau grants lebih besar dari pendapatan asli daerahnya yang akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja pembangunan daerahnya. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Maimunah (2008) menemukan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerahnya. Maimunah (2008) juga mengatakan bahwa fenomena *Flypaper Effect* berpengaruh dalam memprediksi belanja daerah tahun kedepannya. Penelitian lain yang merespon terjadinya pengaruh *Flypaper Effect* dalam merespon Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah.

Pemerintah daerah sendiri mengharapkan penduduk yang lebih produktif dikarenakan dengan semakin tinggi tingkat keproduktifan penduduk semakin besar pula kesempatan untuk tercipta lapangan kerja, selain itu juga jumlah penduduk yang diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) akan membantu membangun pemerintah daerah.

Penetapan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dengan adanya penetapan Undang Undang tersebut, dapat mendorong pemerintah daerah untuk mampu melaksanakan dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya yang terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat diharapkan mampu membuat peningkatan pelayanan publik yang semakin memuaskan, sehingga dibentuk anggaran daerah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD secara bersama, dan ditetapkan pada peraturan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Pemerintah daerah wajib membuat alokasi dana dalam bentuk anggaran modal dalam APBD yang gunanya untuk menambah aset tetap. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja modal ini

didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk prasarana kegiatan pemerintah daerah maupun fasilitas publik.

Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan dan kendaraan atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal ini suatu upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas dalam menunjang kinerja pemerintah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Belanja modal merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan daerah, pemerintah daerah juga memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA merupakan sumber penerimaan internal Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan suatu daerah pada tahun berjalan. SILPA yang ada di semua pemerintah daerah disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu pelampaun pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam anggaran. Jumlah SILPA yang dihasilkan pada suatu daerah tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Karena peningkatan SILPA yang semakin tinggi dari tahun ke tahun selanjutnya memang disengaja oleh pemerintah daerah karena dapat membuat pemerintah daerah termotivasi untuk melakukan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran berikutnya. SILPA dijadikan sebagai indikator efisiensi, karena apabila terjadi surplus dalam APBD baru terbentuk adanya SILPA dan sekaligus terjadinya pembiayaan netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maimunah (2006) tentang *Flypaper Effect* yang memberikan hasil bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh secara signifikan dan Haryo (2007) yang memberikan hasil bahwa *Flypaper Effect* tidak berpengaruh dan penelitian yang dilakukan Prakoso (2004) tentang pengaruh PAD, DAU dan SILPA terhadap Belanja Modal yang memberikan hasil bahwa PAD, DAU dan SILPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga peneliti ingin menguji tentang *Flypaper Effect* PAD, DAU dan SILPA terhadap Belanja Modal menggunakan periode tahun 2014 sampai 2016 dengan sampel Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dari uraian yang sudah digambarkan secara umum diatas maka penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *FlyPaper Effect* Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. (2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. (3) Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal. (4) Apakah *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan, untuk: (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. (2) Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. (3) Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal. (4) Untuk menguji pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORETIS

Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan merumuskan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekarang regulasi tersebut digantikan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah seharusnya mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajiban daerahnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal dilihat dari sisi belanja (*expenditure*) diartikan sebagai kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Fungsi dari pemerintah pusat itu sendiri adalah dengan hanya mengawasi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Namun daerah justru bergantung kepada pemerintah pusat, maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Ini yang membuat desentralisasi fiskal dan otonomi daerah hanya sebagai memindahkan eksternalitas negatif dari pemerintah pusat di era orde baru menuju Pemerintah Daerah di era reformasi ini.

Otonomi Daerah

Menurut Kuncoro (2004: 22) Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 1999 Otonomi Daerah adalah Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang Undang ini dapat memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten/Kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, pada reformasi saat ini daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya. Salah satu dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari *command and control* menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak bisa lepas tangan secara penuh, sehingga pemerintah pusat masih harus memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus mampu dalam menjalankan pembangunan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberikan informasi secara rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan sebagaimana program-program tersebut terus dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. Ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi dan

pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya otonomi, kemandirian daerah dapat diwujudkan yang dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat.

Pendapatan Asli Daerah selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah atau pungutan lainnya seperti retribusi dan pungutan lain yang sah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat liminitif (*closed-list*) artinya bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi pendapatan asli daerah masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002). Dari pengertian yang diambil melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan disisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah.

Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, yang aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal diukur dengan: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan atau biaya perolehan.

Flypaper Effect

Istilah *Flypaper Effect* pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich dan Rubinfield (1979) untuk mengartikulasikan pemikiran yang menyatakan "*money stick where it its*". Sejauh ini belum ada pemberian kata *Flypaper Effect* dalam bahasa Indonesia, sehingga kata ini dituliskan sebagaimana tanpa adanya diterjemahkan.

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada kondisi ketika pemerintah daerah merespon lebih banyak belanja daerah yang berasal dari dana transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat daripada pendapatan asli daerahnya, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerahnya. Maimunah (2006) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU daripada dengan menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Hipotesis merupakan hubungan antara beberapa variabel yang masih bersifat sementara atau masih dugaan yang nantinya akan dilakukan suatu pengujian untuk membuktikan kebenaran dari dugaan sementara tersebut. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan berdasarkan besar atau kecilnya PAD. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan dapat tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007) dan memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Dengan demikian hipotesis pertama adalah: H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Terdapat hubungan yang kuat antara Dana Alokasi Umum dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi belanja modal yang akan dibelanjakan. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai Dana Alokasi Umum. Abdullah dan Halim (2006: 26) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007), Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua adalah:

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni pertama untuk melanjutkan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan kedua membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga adalah:

H₃: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Flypaper Effect terhadap Belanja Modal

Flypaper Effect adalah suatu fenomena yang terjadi pada suatu kondisi dimana komposisi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja yang lebih besar bersumber dari Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah. *Flypaper Effect* terjadi karena kepentingan pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Hal ini yang mengakibatkan kemalasan fiskal daerah, karena pemerintah daerah akan mengupayakan Dana Alokasi Umum yang lebih besar daripada kerja keras untuk mengoptimalkan kemampuan sendiri dengan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan (Maimunah, 2006) menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Belanja. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Flypaper Effect* berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat

sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian tersebut memperoleh data dengan cara data sekunder, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh *Flypaper Effect* Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Populasi penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang dimana menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan, penelaahan, pencatatan, pengumpulan dan perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain dengan metode dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini baik dari buku, arsip ataupun hasil penelitian terdahulu.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan *Flypaper Effect*.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang diperoleh daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan satuan rupiah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah akan mendapatkan DAU dalam jumlah yang relatif besar, sebaliknya daerah yang mempunyai kemampuan fiskal tinggi akan mendapat DAU dalam jumlah yang kecil. Variabel Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah DAU kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam periode tahun 2014 hingga tahun 2016 dengan satuan rupiah. Menurut Putro dan Pamuji (2011) dan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Celah Fiskal}$$

Dimana:

Alokasi Dasar = Gaji PNS Daerah

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, yaitu selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Angka SILPA ini dalam penyusunan APBD seharusnya nol (0). Artinya pembiayaan neto harus bisa menutup defisit anggaran.

Jika SILPA positif, berarti besarnya pembiayaan neto, setelah dikurangi untuk menutup defisit anggaran, masih ada dana tersisa. Jika SILPA negatif, berarti pembiayaan neto belum mampu untuk menutup defisit anggaran. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya dengan mencari sumber penerimaan lain seperti pinjaman atau pencairan dana cadangan, sehingga angka SILPA nol. Rumus perhitungan SILPA sebagai berikut:

SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan suatu fenomena dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan sebagai DAU, daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan PAD. Ketika koefisien DAU lebih besar pengaruhnya signifikan terhadap Belanja daripada PAD maka, situasi ini disebut *Flypaper Effect*. Atau dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $\frac{b_1}{b_2} > 1$ maka terjadi *Flypaper Effect*, dan sebaliknya (Afriawati, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, dengan memodifikasi sistem penilaian dengan memberikan nilai 1 apabila terjadi *Flypaper Effect* dan nilai 0 apabila tidak terjadi *Flypaper Effect*.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Yang dimaksud dengan belanja modal adalah angka realisasi belanja modal pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2014 hingga tahun 2016. Untuk menghitung rasio Belanja Modal diukur dengan rumus:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel penelitian. Statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Dalam pengujian statistik deskriptif ini juga bertujuan untuk membandingkan antara, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), *Flypaper Effect* dengan Belanja Modal dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pengujian atas data yang diperoleh untuk memenuhi asumsi dasar. Pada model regresi linier berganda terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, untuk itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik terlebih dahulu sebelum beranjak ke model regresi linier berganda. Adapun asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression, Standardized Residual)*, dengan syarat data penelitian harus mengikuti garis diagonal antar 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *non parametric Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi dengan tidak normal (Ghozali, 2006).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

Uji Autokorelasi

Menurut Suliyanto (2011), uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*times-series*). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokolerasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokolerasi. Menurut Sunyoto (2013), salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokolerasi, bila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokolerasi.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediktif tunggal. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 SILPA + \beta_4 FEF + e$$

Dimana :

BM	= Belanja Modal
α	= Konstanta
β	= Slope atau koefisien regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
SILPA	= Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
FEF	= <i>Flypaper Effect</i>
e	= error

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Goodness of Fit / Uji f

Menurut Widarjono (2013) Uji F digunakan untuk uji signifikansi kelayakan model. Uji F juga dapat menunjukkan apakah variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel dependen atau tidak. Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA) yang dapat dilihat pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan melihat nilai *p-value* atau *level of significant* yaitu 5% atau 0,05. Prosedur pengujian kesesuaian model yaitu sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikan (*p-value*) < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (b) Jika nilai signifikan (*p-value*) < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis / Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5% (Ghozali, 2006).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis deskriptif akan disajikan gambaran dari masing-masing variabel penelitian yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan *Flypaper Effect*, serta Belanja Modal sebagai variabel dependen. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian diperoleh pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	105	68.442	1.785.125	411.322,77	284.839,44
PAD	105	38.794	4.035.650	322.319,40	568.589,59
DAU	105	182.420	1.586.836	836.895,48	272.070,90
SILPA	105	50.696	1.414.930	275.369,15	213.909,86
FEF	105	0,00	1,00	0,95	0,21
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2017.

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 38.794 Juta pada Kota Batu tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar Rp 4.035.650 Juta pada Kota Surabaya tahun 2015. Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 182.420 Juta pada Kabupaten Pacitan tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.586.836 Juta pada Kabupaten Jember tahun 2015. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai minimum sebesar Rp 50.696 Juta pada Kota Pasuruan tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.414.930 Juta pada Kota Surabaya tahun 2015. *Flypaper Effect* memiliki nilai minimum sebesar 0,28 pada Kota Surabaya tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 6,70 pada Kabupaten Madiun tahun 2014. Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp 68.442 Juta pada Kabupaten Probolinggo tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.785.125 Juta pada Kota Surabaya tahun 2015.

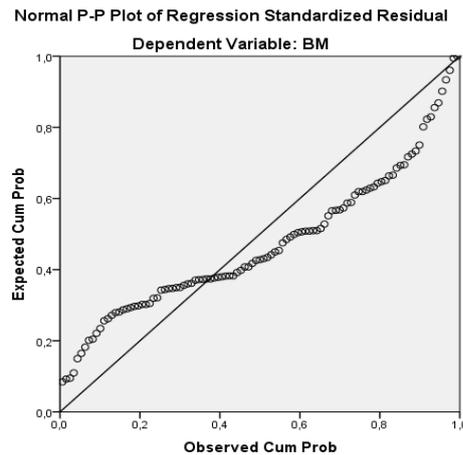
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari keempat uji asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedasitas. Perhitungan uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji Normalitas analisis Grafik

Gambar 1 berikut ini menyajikan grafik P-Plot yang dapat menggambarkan distribusi data. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS uji normalitas didapat grafik sebagai berikut yang menjelaskan Hasil *Normal Probability Plot* pada gambar 1 dibawah ini dapat diketahui bahwa sumbu menyebar menjauh pada garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa *Normal Probability Plot* berdistribusi tidak normal.



Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Gambar 1
Grafik P-Plot

Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,005 atau tidak lebih besar dari dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Hal ini berarti terjadi masalah normalitas dalam penelitian ini, untuk memperbaiki hasil model regresi jika terdapat masalah normalitas dapat dilakukan dengan cara transformasi data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma agar setiap variabel yang dilakukan dapat memenuhi asumsi klasik.

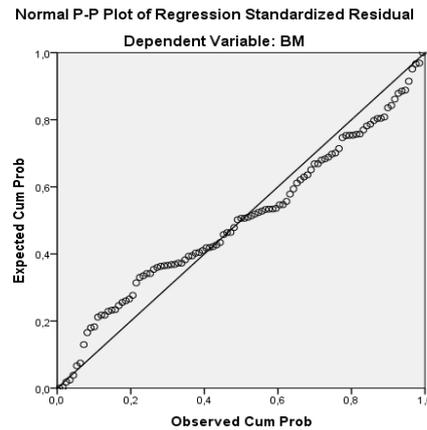
Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	194194,4098
Most Extreme Differences	Absolute	,170
	Positive	,170
	Negative	-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		1,737
Asymp. Sig. (2-tailed)		,005

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Uji Normalitas Analisis Grafik Setelah di Transformasi Data

Berdasarkan gambar 2 hasil dari uji normalitas data setelah transformasi data terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal, namun ada titik-titik yang menyebar jauh disekitar garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau biasa disebut model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan yaitu penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal.



Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Gambar 2
Grafik P-Plot

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Setelah di Transformasi Data

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* setelah transformasi data diatas hasil pengujian normalitas terhadap 105 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada hasil dengan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,173 lebih besar dari 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,17388181
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,108
	Positive	,082
	Negative	-,108
Kolmogorov-Smirnov Z		1,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,173

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Uji Multikolinearitas

Dari hasil dibawah ini yang sudah dianalisis dan diuji menunjukkan pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan *Flypaper Effect* memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance value diatas 0,10. Dengan demikian disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak ada yang mengandung adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	0,247	4,052
DAU	0,525	1,904
SILPA	0,355	2,814
FEF	0,503	1,988

a Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Uji Autokorelasi

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi telah menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,099 terletak diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,757 ^a	0,572	0,555	0,17733	2,099

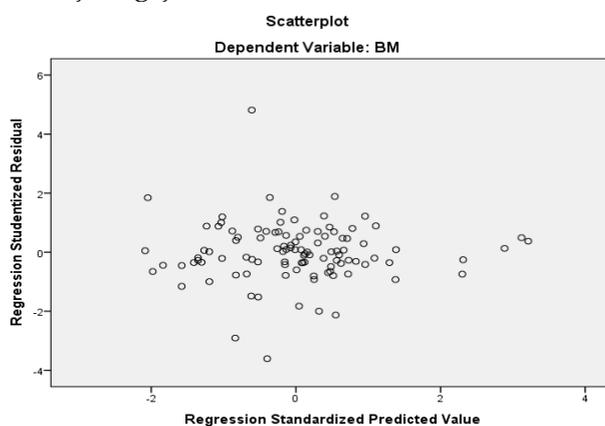
a Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

b Dependent Variable: BM

Sumber : Data sekunder diolah, 2017.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Gambar 4 diatas terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dari tidak membentuk plot tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.



Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Gambar 3
Grafik Scatterplot

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis tersebut digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari data yang sudah diperoleh dan diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,680	0,659		1,032	0,305
	PAD	0,245	0,100	0,324	2,459	0,016
	DAU	0,460	0,143	0,290	3,219	0,002
	SILPA	0,179	0,108	0,182	1,663	0,099
	FEF	-0,112	0,115	-0,090	-0,976	0,331

a Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Dari hasil output SPSS yang disajikan Tabel 6 di atas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM = 0,68 + 0,245PAD + 0,460DAU + 0,179SILPA - 0,112FEF + e$$

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi atau *R square* dalam penelitian ini sebesar 0,572 atau sebesar 57,2%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu PAD, DAU, SILPA dan FEF selama tahun 2014-2016 mempengaruhi variabel terikat (BM) adalah sebesar 57,2% dan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 7
Nilai Adjusted R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,757 ^a	,572	,555	,17733	2,099

a. Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Uji Goodness of Fit / Uji f

Berdasarkan hasil dari output SPSS yang telah disajikan pada Tabel 8 diatas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 33,461 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai F memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkann bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokai Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan *Flypaper Effect* berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Tabel 8

Hasil Uji Goodness of Fit
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,209	4	1,052	33,461	,000 ^b
	Residual	3,144	100	,031		
	Total	7,353	104			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), FEF, DAU, SILPA, PAD

Sumber: Data sekunder diolah, 2017.

Uji Hipotesis / Uji t

Uji t memiliki fungsi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal. Dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis pertama (PAD)

Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 2,459 dengan tingkat signifikansi 0,016 yaitu nilai signifikansi tersebut $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengujian hipotesis kedua (DAU)

Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal berdasarkan regresi menunjukkan nilai t sebesar 3,219 dengan tingkat signifikan 0,002 yaitu nilai signifikansi tersebut $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengujian hipotesis ketiga (SILPA)

Pengaruh variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal berdasarkan regresi menunjukkan nilai t sebesar 1,663 dengan tingkat signifikan 0,099 yaitu nilai signifikansi tersebut $> 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak yang memiliki arti bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengujian hipotesis keempat (FEF)

Pengaruh variabel *Flypaper Effect* terhadap Belanja Modal berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar -0,976 dengan tingkat signifikan 0,331 yaitu nilai signifikansi tersebut $> 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_4 ditolak yang memiliki arti bahwa variabel *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah daerah atas belanja modal juga semakin tinggi. 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti SILPA digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. 4) *Flypaper Effect* tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur sudah baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi. 2) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek dan tahun penelitian lebih diperpanjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintah dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 02(2).
- Abimanyu. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 08(2): 416-424.
- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*. Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.
- Ardhini, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

- (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Courant, etc. 1979. "The Stimulative Effect of Intergovernment Grants: Or Why Money Sticks Where It Its". Urban Institute. Washington DC.
- Darwanto, dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianto, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Haryo, K. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Kusnandar dan D. Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah*. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mentayani, I dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal Infestasi* 9 (2): 91-102.
- Oates, W. E. 1999. *An Essay on Fiscal Federalism*. *Journal of Economic Literature* 37(3): 1120-1149.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Prakoso, K. B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 08(2).
- Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta.
- Sunyoto, D. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama Anggota Ikapi. Bandung.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Trunbull, G. K. 1998. *The Overspending and Flypaper Effect of Fiskal Illusion: Theory and Empirical Evidence*. *Journal of Urban Economics* 44 (1-26). Academia Press.
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Daerah dan Pusat.
- Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Ekonomis. Jakarta.